

**IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* TERHADAP *ECONOMY* PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA KUPANG*****Daflora V. Suryawati*¹*****Fransina W. Ballo*²*****Sarlin P. Nawa Pau*³****^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Cendana, Kupang,
NTT,Indonesia.****ABSTRAK**

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan Ibu kota Provinsi NTT. Selain itu Kota kupang juga merupakan kota pelajar yang ada di NTT sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk Di kota kupang setiap tahun semakin meningkat dan mengakibatkan aktifitas ekonomi juga meningkat dan kondisi ini mendorong meningkatnya produksi sampah di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang dan juga Untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Kota Kupang memahami sampah sebagai isu publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada masyarakat Kota Kupang, pemerintah, dan juga kepada penulis.

Kata Kunci: *Green Economy, Pembangunan Berkelanjutan.*

ABSTRACT

The city of Kupang is a city located in the province of East Nusa Tenggara and is the capital of the province of NTT. In addition, the city of Kupang is also a student city in NTT, so this indicates that the population density in the city of Kupang is increasing every year and resulting in increased economic activity. and this condition encourages increased waste production in Kupang City. The purpose of this research is to explain the implementation of Green Economy for Sustainable Development in Kupang City and also to explain how the people of Kupang City understand waste as a public issue. This study uses a descriptive qualitative method. The results of this study are recommended to the people of Kupang City, the government and also to the author

Keywords: *Green Economy, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan Ibu kota Provinsi NTT. Selain itu Kota Kupang juga merupakan kota pelajar yang ada di NTT sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk Di kota Kupang setiap tahun semakin meningkat dan mengakibatkan aktifitas ekonomi juga meningkat dan kondisi ini mendorong meningkatnya produksi sampah di Kota Kupang. Oleh karena itu, Kota Kupang menghadapi persoalan menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengelolaan persampahan (Natun, 2019).

Program pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI) melalui Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Organogram memberikan detail visual mengenai bagaimana program ini mendukung para pemangku kepentingan utama. Indonesia adalah salah satu pendiri GGGI, yang didirikan pada 2012 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan sekedar dua tujuan yang kompatibel. Kedua tujuan ini harus diintegrasikan untuk masa depan umat manusia.

Sejak 2013, program ini berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari pemerintah Norwegia pada tahap 1 (2013-2015) dan tahap II (2016-2019).

Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Seiring dengan perkembangan penduduk Kota Kupang, aktivitas sosial dan ekonomi menjadi semakin pesat, maka produksi sampah juga semakin banyak dan menjadi persoalan publik yang serius di berbagai negara terutama di wilayah perkotaan. Secara objektif, sampah adalah persoalan publik yang nampak mencolok di Kota Kupang. Sampah yang berserakan disetiap sudut Kota baik di pusat kegiatan ekonomi, pemerintah dan pendidikan serta fasilitas publik nampak tidak terkelola dengan baik. Pada tahun 2019, Kota Kupang menjadi salah satu Kota

terkotor di Indonesia oleh kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu Gubernur Nusa Tenggara Timur juga memberikan penilaian bahwa Kota Kupang adalah Kota terjerok di Nusa Tenggara Timur. Jumlah sampah yang dikumpulkan itu terdiri atas sampah-sampah anorganik seperti plastik, logam serta kaca dan juga sampah organik. Melihat banyaknya sampah-sampah yang dikumpulkan itu, pihak BBKSDA mengimbau agar masyarakat Kota Kupang dapat menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dampaknya akan sangat buruk baik bagi manusia hingga bagi hewan khususnya hewan laut. Produksi sampah juga juga berasal dari sampah rumah tangga, sehingga sangat diperlukan kesadaran dan komitmen penanganan dan pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga. Menurut kebijakan itu disusun sebagai respons atas produksi sampah yang semakin meningkat. Produksi sampah di Kota Kupang, per harinya mencapai 86 ton.

Sampah juga menjadi persoalan publik yang penting, dan bisa membawa dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Beberapa jenis penyakit yang timbul akibat dari lingkungan yang tercemar oleh sampah seperti diare, infeksi saluran pernafasan bawah, berbagai jenis luka yang tidak intens, malaria dan sebagainya. Selain itu sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi media berkembang biaknya bermacam vektor penularan penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus. Sampah basah yang mengandung telur cacing berpotensi menyebar ke hewan peliharaan contohnya babi, yang apabila makanannya tidak dimasak secara baik juga akan berpotensi menyebar ke manusia yang mengonsumsinya.

Permasalahan sampah ini, mendapat respon dari berbagai pihak yang berbeda bukan hanya pemerintah dan warga masyarakat (publik), tetapi juga antar Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diperlukan penguatan tata kelola lingkungan dan kebencanaan yang komprehensif dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang, dan jika tidak dilakukan akan mengancam daya dukung dan ketahanan lingkungan bagi generasi mendatang. Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat memperkuat tata kelola lingkungan dan kebencanaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Agenda Baru Perkotaan atau *New Urban Agenda* (NUA), yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDG). Salah satu prinsip dasar *New Urban Agenda* (NUA), keberlanjutan lingkungan hidup, sejalan dengan misi pembangunan Kota Kupang menuju metropolitan berwawasan lingkungan atau

“Kupang Hijau”. Prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan kota untuk semua, kota yang disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat, generasi mendatang, dan juga bagi seluruh komponen lingkungan hidup (Sarosa, 2019). Hal ini nampak pada tidak sinerginya gerak dan kebijakan pemerintah dalam menangani sampah di Kota Kupang.

Hubungan *Green Economy* dengan Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam laporan Komisi Dunia PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa-masa mendatang (Makmun, 2011). Dalam perkembangannya, dengan semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan, maka berkembanglah konsep ekonomi hijau (*green economy*), sebagai konsep yang mendukung berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Namun mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk seluruh Negara, maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula, dengan mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing Negara.

Kota Kupang adalah ibu kota provinsi dengan tingkat aktivitas sosial dengan ekonomi relatif yang paling tinggi di NTT. Implikasinya adalah produksi sampah dengan volume yang besar menjadi persoalan publik yang tidak terhindarkan. Kota Kupang adalah wilayah yang menampung aktivitas pemerintahan tidak hanya pemerintahan Kota Kupang tetapi juga pemerintah provinsi NTT.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang?
2. Bagaimana masyarakat Kota Kupang memahami sampah sebagai isu publik?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi *green economy terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang*
2. Untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Kota Kupang memahami sampah sebagai isu publik

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai gambaran nyata tentang implementasi *green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang.

2. Bagi Peneliti yang Akan

Datang

Menambah pengalaman dan wawasan mengenai proses melakukan penelitian yang berguna bagi penelitian lain baik dalam hal kegiatan akademis maupun non-akademis dimasa yang akan datang. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan memberikan referensi untuk melakukan riset dimasa yang akan datang tentang implementasi *green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti dan pengetahuan implementasi *green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang.

2. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya implementasi *green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis

1. Konsep *Green Economy*

Green Economy adalah kegiatan ekonomi rendah karbon dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan berkeadilan sosial. Konsep green economy tersebut sudah dirancang oleh pemerintah untuk menciptakan green economy Indonesia yang lebih baik. Salah satu ancaman dan juga tantangan atas kelangsungan pembangunan ekonomi nasional adalah dunia yang sudah berubah. Dunia sekarang ditandai oleh berlangsungnya proses globalisasi yang membawa konsekuensi bahwa setiap fenomena perubahan di salah satu bagian dunia atau pada bidang tertentu dengan cepat berpengaruh pada fenomena lain atau meluas ke bagian dunia yang lain. Dari segi ekonomi, perekonomian sistem pasar sekarang sedang meluas menjadi sistem dengan satu pasar, yaitu pasar global. Tidak ada satu Negara pun dapat mengisolasi diri dari dunia luar. Namun, perubahan dunia ini juga memberikan peluang pada pembangunan ekonomi nasional bila dikelola dengan baik. Peningkatan ketahanan ekonomi nasional menjadi bagian penting dalam menghadapi globalisasi yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatifnya. Suatu negara mempunyai ketahanan ekonomi bila mempunyai kemampuan ekonomi yang tidak tergoncangkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh globalisasi, serta mampu memberi kesejahteraan yang meningkat kepada rakyatnya melalui pembangunan (Makmun, 2011).

2. *Green Economy* dalam Pembangunan Berkelanjutan

Green Economy adalah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu

penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, dimana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan asset. Untuk tinjauan umum tentang kebijakan pembangunan lingkungan internasional yang menuju ke laporan ekonomi hijau program lingkungan perserikatan bangsa bangsa (PBB). Contoh *Green Economy*, yang pertama penguangan emisi gas buang CO₂, yang kedua penanggulangan efek rumah kaca, yang ketiga program penghijauan dan yang keempat program industri ramah lingkungan .

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Istilah ini untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada tahun 1980.

4. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari pada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Laporan Brundtland pada tahun 1987 yang pertama kali mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat

t ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Bovar et al., 2008). Model dasar pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai bentuk yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Johnston, 2007).

Berdasarkan Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001), skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut, lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa: Keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Berbagai lembaga telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matriks dan indikator keberlanjutan. Secara umum, Indikator pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan beberapa aspek, yakni aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik dan budaya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mel

akukan observasi ke lapangan guna mendapatkan jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi (Mardalis, 2003:6).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6).

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pelaksanaan program *green economy* dan bagaimana dampaknya terhadap Implementasi *Green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di kota kupang.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara terkait Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kupang.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sampah yang membutuhkan waktu untuk terurai.

2. Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para yang bersangkutan dikantor kebersihan lingkungan melalui observasi dan wawancara. Data primer yang dimaksud seperti opini subjek atau orang (ketua

anggota), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan yang sedang dilakukan.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) yang biasa diakses menggunakan website <http://lokadata.beritagar.id> dan publikasi pembangunan berkelanjutan yang diakses pada website <http://www.pb.go.id>

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang dengan memfokus pada lingkungan yang tercemar oleh sampah di Kota Kupang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah kurang lebih 1 (satu) bulan.

Informant Penelitian

Informant dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informant yang dipilih memiliki kriteria yaitu merupakan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang mengetahui pelaksanaan Program Green Teori Kota Kupang. Informant dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang dan staf.

Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:334).

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya melalui wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai implementasi *green economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di kota kupang.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti Dari pengumpulan data jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mengenai Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kupang.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan hasil wawancara dan observasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi yang menjelaskan kendala, risiko, dan Peran Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kuapang

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini mencari implementasi pembangunan berkelanjutan.

Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini data yang diuji merupakan data hasil wawancara peneliti

2. Triangulasi Metode

Peneliti ini menggunakan tiga metode utama yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

3. Triangulasi Teori

Teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menyangkut implementasi *green economy* pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang merupakan upaya berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Ada beberapa aspek pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- Pengelolaan air bersih: Kota Kupang harus memastikan pasokan air bersih yang memadai untuk penduduk. Contohnya adalah membangun sistem pengolahan air yang efisien dan melestarikan sumber air.
- Konservasi alam: Melestarikan hutan dan lingkungan alam sekitar Kota Kupang untuk mencegah erosi tanah dan kerusakan ekosistem.

1. Transportasi Ramah Lingkungan:

- Pengembangan transportasi umum: Memperluas dan meningkatkan sistem transportasi umum, seperti bus atau angkutan umum lainnya, untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca.
- Pembangunan jalur sepeda: Membangun jalur sepeda yang aman dan nyaman untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan.

3. Energi Bersih:

- Penggunaan energi terbarukan: Menggantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti panel surya atau tenaga angin untuk mengurangi emisi karbon.
- Efisiensi energi: Mengadopsi teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi di gedung-gedung dan infrastruktur umum.

4. Peningkatan Kualitas Hidup:

- Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas: Meningkatkan akses penduduk Kota Kupang ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.
- Pembangunan infrastruktur

sosial: Membangun taman umum, lapangan olahraga, dan tempat rekreasi lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

5. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan:

- Promosi ekonomi lokal: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Dukungan terhadap pertanian berkelanjutan: Memberikan pelatihan dan bantuan kepada petani dalam menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Pengurangan Limbah dan Pencemaran

- Pengelolaan limbah yang efisien: Meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan limbah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
- Pengendalian pencemaran udara: Memastikan bahwa industri dan kendaraan mematuhi standar emisi untuk mengurangi polusi udara.

7. Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan: Mengadakan konsultasi publik dan forum partisipasi untuk memungkinkan penduduk Kota Kupang berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan ekonomi adalah pertumbuhan tanpa merusak basis modal ekonomi. Namun, dalam praktiknya lebih tentang rekonsiliasi dari pada integrasi dalam menangani hubungan sehingga konsep ekonomi hijau dapat membantu. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta kedalam kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (UNEP,2022). Dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau yaitu mencari pertumbuhan dari

investasi lingkungan yang pro miskin, konsep ini dapat membantu mengubah fokus perdebatan dari rekonsiliasi menjadi sinergi hubungan.

Ekonomi hijau harus mengatasi masalah skala ekonomi secara keseluruhan, melalui penempatan material dan energi. Pertumbuhan GDP dapat terus berlanjut jika kita hanya membuat produk hijau. Konsep ekonomi hijau berguna sejauh melibatkan pembuat kebijakan, ekonomi, dan pelaku bisnis dalam dialog kritis dengan pemangku kepentingan lain yang bertujuan membandingkan jalur alternative untuk pembangunan. Perbandingan tersebut kemudian harus mempertimbangkan criteria ekonomi disamping criteria sosial, politik, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan.

Kebijakan dan praktik ekonomi mengatur seberapa berkelanjutan jalur pembangunan karena mendorong dua penyebab utama : Produksi limbah yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pendorong utama kesejahteraan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk lingkungan membutuhkan komitmen masyarakat bersama untuk pekerjaan yang lebih hijau, serta teknologi yang lebih hijau untuk energi, transportasi, pertanian, pengolahan limbah, pasokan air, dan sanitasi air limbah, serta pencegahan penyakit dan kesehatan. Tidak hanya satu sektor atau topik yang menjadi perhatian tetapi semua secara eksplisit terkait sebagai sistem sosial ekonomi dan ekologi yang dinamis, pemikiran dan tindakan ekonomi hijau yang autentik dan inovatif dapat membentuk konsep baru “ ekonomi” yang intinya adalah keberlanjutan dan keadilan sosial.

Tiga poin utama perlu dipertimbangkan dalam diskusi kebijakan, ada multiplisitas ekonomi hijau, gagasan yang berbeda tentang kehijauan dapat menyebabkan konflik antara inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan perbandingan ekonomi hijau. Sebuah utopia/komunitas lingkungan mungkin ada saat kegiatan mendorong pertumbuhan ekonomi bersifat komplementer dan hijau: pertanian bersifat organik dan beragam; energi terbarukan; konservasi hutan dan fauna liar menguntungkan secara ekonomi; hingga bahan limbah yang dapat dimanfaatkan kembali. Penggunaan lahan untuk pertanian dapat dipandang bertentangan dengan skema konservasi yang diban

gun di sekitar taman dan kawasan lindung. Akhirnya, berbagai jenis kehijauan ini adalah secara implisit atau eksplisit menjadi fokus dalam debat kebijakan. Terlepas dari komplikasi ini, gagasan ekonomi hijau yang secara inheren menyarankan alternatif yang tidak ramah lingkungan akan mendorong pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan yang berkelanjutan.

Konsep ekonomi hijau sangat penting untuk memajukan kebijakan pembangunan berkelanjutan, karena konsep ini menjadi inti permasalahan maupun mengatur ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prasyarat ekologis lokal dan global serta dinamika jangka panjang. Umat manusia menghadapi tantangan serius dalam beberapa dekade mendatang: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya ketidaksetaraan, dan tantangan lain.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 tahun 2009).

Sampah merupakan salah satu masalah yang tidak ada habis-habisnya di Kota Kupang. Sampah menjadi masalah karena volume yang dihasilkan jauh melebihi daya tampung yang tersedia, disamping itu sampah tidak pernah mendapatkan perhatian serius karena memang tidak bisa memberikan keuntungannya. Namun bila sampah tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius bisa menyebabkan berbagai masalah, baik itu dari segi kebersihan.

Kemajuan pembangunan Kota Kupang dalam beberapa tahun ini telah mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Investor yang semakin banyak berdatangan di Kota Kupang menambah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pembangunan Ruko, Mal, Sekolah, Universitas, Rumah Sakit, Tempat Hiburan dan sebagainya merupakan daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk pindah ke Kota Kupang. Sehingga orang yang datang ke Kota Kupang memiliki beragam latar belakang pendidikan maupun pekerjaan. Penjaga toko, anak sekolah, mahasiswa, guru, dosen, pegawai, tuk

ang ojek, pedagang keliling, pemulung, penyedia jasa hiburan dan sebagainya datang ke Kota Kupang.

Perekonomian Kota Kupang mulai menarik, hal ini merupakan hal yang sangat baik ditinjau dari sisi ekonomi.

Pendapatan masyarakat meningkat yang member dampak positif bagi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat tidak hanya memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif salah satunya adalah masalah persampahan yang tidak kunjung mendapatkan perhatian yang baik. Seperti diungkapkan dalam laporan UNEP tahun 2005 bahwa pemerintah di Negara berkembang hanya mengalokasikan 0,5% PDB untuk mengelola sampah, dan 80% dari dana yang dialokasikan hanya digunakan untuk mengumpulkan sampah. Jadi bisa dibayangkan kecilnya perhatian pemerintah mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang berbagai penyakit yang dapat menyebabkan penyakit bagi warga yang tinggal di sekitar tumpukan sampah. Sampah yang dibuang secara sembarangan di jalan maupun pada saluran pembuangan menjadi masalah tersendiri pada musim hujan, menimbulkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk dan dapat menyebabkan terjadinya banjir karena saluran yang seharusnya dilalui air tersumbat oleh sampah.

Pengelola sampah di Kota Kupang saat ini masih menggunakan paradigma konvensional, paradigma ini menekankan pada kegiatan kumpul, angkut dan buang. Pengelola sampah yang terjadi di Kota Kupang sekarang ini adalah proses pengolahan sampah dengan menggunakan paradigma konvensional yakni kumpul, angkut, buang. Bahkan, yang paling menyedihkan lagi adalah pemerintah kota (pemkot) Kupang menggunakan paradigma konvensional, namun sampah yang dihasilkan pada tiap titik penempatan sampah yang belum semua terangkut. Kendala Kapasitas pelayanan terbatas.

- a. Paradigma lama pengelolaan sampah mengandalkan proses (kumpul, angkut, kutb uang)
- b. Prioritas pendanaan sangat

rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan.

- c. Kapasitas kelembagaan belum memadai (status, kewenangan, perencanaan, pengawasan, SDM, dll).
- d. Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kendala lainnya, masih belum optimalnya teknologi pengolahan sampah yang dapat mereduksi volume sampah dengan laju tinggi dan ramah lingkungan, namun dengan biaya yang terjangkau. Ditambah dengan rendahnya investasi swasta untuk teknologi pengolahan sampah.

Kehadiran sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan yakni masalah yang berhubungan dengan hilangnya keindahan (estetik) sehingga lingkungan menjadi jorok dan masalah kebersihan yakni lingkungan menjadi kotor karena sampah yang berserakan dan terjadi pencemaran lingkungan apabila ada sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Masalah lain yang lebih berdampak serius akibat pengelolaan sampah yang tidak baik adalah berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat yakni sampah menjadi media penular penyakit. Pengelolaan sampah yang baik dan tepat akan membebaskan lingkungan dari hal-hal yang kotor atau jorok dan lingkungan menjadi bersih. Cara yang benar mengelola sampah di suatu wilayah, yakni *para digma zero waste* (bebas sampah). Prinsip pengolahan sampah *zero waste* (bebas sampah) ini adalah sampah yang dikumpulkan dari warga langsung dipilah berdasarkan bahan. Ada pos untuk menampung sampah organik, kertas, plastik, logam botol. Tahap ini disebut fase praproses atau persiapan. Kemudian dilanjutkan dengan fase pengolahan. Sampah organik diolah menjadi pupuk (kompos), sedangkan bahan-bahan lainnya menjadi produk daur ulang. Sampah yang tidak bisa diolah kembali, seperti botol dan kaca, dikumpulkan untuk diolah sesuai keperluan. Sementara sisa limbah yang tidak mungkin lagi dijadikan komoditas dagang diproses di fase terakhir yakni pembakaran.

KESIMPILAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang

Dalam ekonomi hijau pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta kedalam kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energy dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (UNEP, 2022).

Kebijakan dan praktik ekonomi mengatur seberapa berkelanjutan jalur pembangunan karena mendorong dua penyebab utama yaitu Produksi limbah yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pendorong utama kesejahteraan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk lingkungan membutuhkan komitmen masyarakat bersama untuk pekerjaan yang lebih hijau, serta teknologi yang lebih hijau untuk energi, transportasi, pertanian, pengolahan limbah, pasokan air, dan sanitasi air limbah, serta pencegahan penyakit dan kesehatan.

2. Masyarakat kota kupang memah-ami sampah sebagai isu publik.

Paradigma konvensional kalau untuk menggunakan paradigma konvensional yakni “kumpul, angkut, buang” maka dalam manajemen pengelolaan sampah yang ada dalam pikiran pengelola sampah hanyalah menyediakan wadah untuk pengumpulan sampah, wadah untuk pengangkut sampah, dan wadah untuk pembuangan sampah.

Kehadiran sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan yakni masalah yang berhubungan dengan hilangnya keindahan (estetik) sehingga lingkungan menjadi jorok dan masalah kebersihan yakni lingkungan menjadi kotor karena sampah yang berserakan dan terjadi pencemaran lingkungan apabila ada sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd R. Taufiq, Richo D. Aviyanti. 2022. *Peran Jurusan Green Economy Dapat Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan*. Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 2. Universitas PGRI Madiun.
- Arianto Nuban, 2022. *Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Naikoten 1 Kota Kupang*. Jurnal Batakarang, volume 3 No 2. Universitas Undana.
- Asrudi, 2021. *Penerapan Konsep Green Economy Di Objek Taman Wisata Wasur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 7 Nomor 2. Pendidikan Ekonomi, Universitas Musamus.
- Barbie. 1993. *Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan. Penelitian Utama, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Bovar et al., 2008. *Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Volume 15 Nomor 1, April 2021. Universitas Ngurah Rai. Brundtland
- Report dari PBB. 1987. *Pembangunan Berkelanjutan*, https://bapeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan_berkelanjutan. diakses 12 Desember 2022.
- Dewi Wungkus Antasari. 2019. *Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kupang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 5 Nomor 2. Universitas Islam Kediri.
- Djajadiningrat. 2005. " *Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan*". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 19. Nomor 2. e-jurnal Badan Kebijakan Fiskal, <https://media.neliti.com/media/publications/77730-ID-green-economykonsepimplementasi-dan-per.pdf>
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Badan Kebijakan Fiska.
- Harwanto dkk, 2021. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Cara Membuang Sampah Pada Tempatnya dan Cara Pengelolaan Sampah*. Volume 1 Nomor 2. Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
- Johnston. 2007. *Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Volume 15 Nomor 1, April 2021. Universitas Ngurah Rai.
- Konsep Pembangunan, <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunaberkelanjutan>, (Diakses pada 12 Desember 2022).
- Laurensius P. Sayrani, Lenny M. Tamunu. 2020. *Kewargaan dan Kalaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah Di Kota Kupang*. Volume 2 Nomor 1.
- Makmun. 2011. *200 Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementrian Keuangan, Artikel dalam jurnal "Ekonomi dan Pembangunan"*, LIPI, Volume XIX Nomor 2.
- Makmun. 2011. *Green Economy Keuangan: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian*. Peneliti utama, Badan Kebijakan Fiskal. <https://media.neliti.com/media/publications/77730-ID-green-economykonse-impleentasi-dan-per,p>
- Monalisa Rahman, 2021 *Faktor Penyebab dan Dampak Serta Kebijakannya Terhadap Permasalahan Pencemaran Sampah*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Implementasi *Green Economy*.....Daflora V. Suryawati, Fransina W. Ballo, Sarlin P. Nawa Pau

- MuhkamatAnwar, 2022. *Green Econo-my sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral*. Jurnal pajak dan keuangan Negara Volume 4 Nomor 15. Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan.
- Natun M. 2019. *Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati Yang Berkelanjutan Dan Pengelolaan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Dipres entasikan Pada Forum 1 Kota Berwaw-asan Lingkungan Dan Berketah-anan, 8 Mei 2019Di Hotel On The Rock, Kota Kupang.
- Panayotu. 1994. *Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan*. Peneliti Uta-ma, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Penerapan Green Economy di Indonesia*, <https://landx.id/blog/penerapan-green-economy-di-indonesia-tantangan-dan-perkembangan>. Diakses pada 29 April 2023.
- Primus Lake, 2019. *Kebijakan -Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang*. Volime 4 Nomor 2. Universitas Nusa-cenda Kupang.
- Prinsip PengelolaanSampah*, Desa Pangalengan, 2021 <https://pangalengan.desa.id>. Diakses 30 April.
- Sheng Fulai. 2010. *Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan*. Peneliti Utama, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, (jurnal *Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Per-anan Kementerian Keuangan*).
- Soares, Wicaksona. 2019. “ *Pengantar: Panduan Praktis Implementasi NUA*” dipresentasikan pada Forum Kota Berwawasan Lingkungan Dan Berketahanan, 8-9 Mei 2019 di Hotel On The Rock.
- Syahputra. 2007. *Green Economy: Konsep, Implementasi Dan Peran Kementerian Keuangan*”. Jurnal Ekonomi Dan Pembangu-nan 19 (2), 1-15. <https://doi.org/10.14203/JEP>.
- Tania, Venny. 16 April 2010. *Green Economy dan Perubahan Iklim*. <http://greenradio.fm>. Diakses 11 Desember 2022.
- UNEP. 2009. *Global Green New Deal-An Update for the G20 Pittsburgh Summit*.” UNEP.
- Widyaiswara. 2021. *Kementerian Esdm Republik Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Esdm Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur*, <https://ppsdmaparat-ur.esdm.go.id>
- <http://dlh.semarangkota.go.id/kendala-dan-solusi-masyarakat-terhadap-program-pengolahan-sampah-oleh-pemerintah>. Diakses 30 April 2023.
- <Hhttps://kupangtribunnews.com/20220/01/20/masalah-sampahdi-Kota-Kupang-masalah-sampah-masih-konvensional>. Diakses 10 juli2023